



No. 092/BP/M-CORPS/XII/2011

Kepada Yth.

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK)
Gedung Baru, Komplek Departemen Keuangan RI
Jalan DR Wahidin Raya No. 1 – Lapangan Banteng
Jakarta 10710
Indonesia**

Dengan hormat,

**Perihal : Surat Pengantar sehubungan dengan Transaksi Pemberian Fasilitas
Pembiayaan kepada PT Petrogas Pantai Madura oleh
PT Barito Pacific Tbk**

Bersama ini kami menyampaikan dokumen keterbukaan informasi kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) sehubungan dengan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT Petrogas Pantai Madura oleh PT Barito Pacific Tbk dalam rangkap 4 (empat), untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu beserta bukti keterbukaan kepada Bursa.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Barito Pacific Tbk

Henky Susanto
Direktur

Salwati Agustina
Direktur

Tembusan Yth,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia



Jakarta, 14 Desember 2011

No : 093/BP/M-CORPS/XII/2011

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan ("Bapepam-LK")
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jalan Dr. Wahidin No. 1 – Lapangan Banteng
Jakarta 10710
Indonesia

Up. Ketua Bapepam-LK

Dengan hormat,

Perihal : Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT Petrogas Pantai Madura oleh PT Barito Pacific Tbk

I. PENDAHULUAN

PT Petrogas Pantai Madura (selanjutnya disebut "PPM") merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), PT Petrogas Wira Jatim (selanjutnya disebut "PWJ") dan PT Wira Usaha Sumekar (selanjutnya disebut "WUS") masing-masing dengan kepemilikan sebesar 49,00%, 25,50% dan 25,50% sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Saham (selanjutnya disebut "APHAS") yang ditandatangani antara para pihak pada tanggal 5 Mei 2010.

PPM yang dimiliki Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 49,00%, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak di Pantai Madura, Madura. Hingga sekarang, PPM masih dalam tahap pengembangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PPM masih membutuhkan modal kerja yang cukup besar.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Mei 2010 Perseroan dan PPM telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan sejumlah maksimum USD 7,50 juta dalam rangka *participating interest* yang dilakukan PPM pada *Madura Offshore Production Sharing Contract* (PSC) sebesar 10,00%. Pada bulan Mei 2011, PPM telah menggunakan fasilitas pinjaman dari Perseroan tersebut sebesar USD 7,46 juta. Sampai dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011, pinjaman Perseroan kepada PPM telah dibayar sebesar (principal) USD 4,08 juta dan bunganya sebesar USD 516,90 ribu sehingga saldo pinjaman Perseroan kepada PPM tersebut memiliki saldo sebesar USD 3,37 juta. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2011 Perseroan dan PPM telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (selanjutnya disebut "PFP") terkait dengan operasional PPM sebagai pemegang 10,00% *participating interest* di Madura Offshore PSC. Madura Offshore PSC merencanakan akan melakukan pembelian *capital expenditure* dalam rangka eksplorasi tambang minyak dimana dana untuk eksplorasi tersebut diperoleh dari seluruh pemegang saham Madura Offshore PSC secara proporsional sesuai dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham. Dalam rangka hal tersebut diatas, Perseroan merencanakan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PPM (selanjutnya disebut "Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan"), yang diharapkan dapat membantu pengembangan Madura Offshore PSC yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi Perseroan.

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680
www.barito-pacific.com

Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam - LK") No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1") mengingat Perseroan memiliki PPM sebesar 49,00% dan salah satu Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama PPM.

Sehubungan dengan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Perseroan telah menunjuk serta menggunakan pendapat dari Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho, Rinaldy & Rekan (selanjutnya disebut "SRR"), selaku penilai independen, yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan.

II. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Untuk lebih mengoptimalkan aset non operasi yang dimiliki Perseroan yaitu pada akun kas dan setara kas supaya dapat menghasilkan imbal hasil bagi Perseroan, Perseroan akan memberikan pinjaman kepada PPM dalam rangka operasional PPM sebagai pemegang 10,00% *participating interest* di Madura Offshore PSC sebesar maksimum USD 4,00 juta dengan bunga 10,00% per tahun untuk tahun pertama terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pertama kali dan selanjutnya LIBOR + 5,00% untuk tahun berikutnya.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Pada tanggal 12 Desember 2011, Perseroan dan PPM telah menandatangani PFP. Dana hasil Transaksi Pembiayaan ini akan digunakan oleh PPM untuk keperluan modal kerja dalam rangka operasional PPM sebagai pemegang 10,00% *participating interest* di Madura Offshore PSC.

A. Ketentuan Penting dalam PFP

Kesepakatan-kesepakatan penting dalam PFP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi berdasarkan PFP adalah fasilitas pembiayaan Perseroan kepada PPM dalam bentuk pinjaman.

2. Jumlah Pokok

Jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada PPM adalah sebesar maksimum USD 4,00 juta.

3. Tujuan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan

Tujuan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PPM adalah untuk memberikan pinjaman kepada PPM dalam rangka operasional PPM sebagai pemegang 10,00% *participating interest* di Madura Offshore PSC.

4. Bunga Pinjaman

Berdasarkan ketentuan dalam PFP, besarnya bunga yang disepakati oleh Perseroan dan PPM adalah sebesar 10,00% per tahun untuk tahun pertama dihitung sejak tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pertama kali dan selanjutnya LIBOR + 5,00% untuk tahun berikutnya.

5. Jangka Waktu

Berdasarkan ketentuan dalam PFP, jangka waktu surat hutang yang diterbitkan Perseroan adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertansaksi dalam Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan adalah Perseroan selaku pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dan PPM selaku pihak yang menerima pembiayaan dari Perseroan. Keterangan mengenai pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan akta Notaris Kartini Muljadi, S.H. No. 8 tanggal 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 364 tanggal 3 Agustus 1979 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 24 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto, S.H. No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Banjarmasin No. 767/RUB/16 10/IX/2007 tanggal 11 September 2007. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: W7-09808 HT.01.04.Th.2007 tanggal 6 September 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87, Tambahan No. 87 tanggal 30 Oktober 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 19 tanggal 12 Mei 2011 dari Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-27243.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor di Jakarta beralamat di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63 Jakarta.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 21 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keterangan mengenai pengurus perseroan (beserta perubahannya) merupakan suatu "keterangan lain" diluar batang tubuh anggaran dasar. Karenanya, perubahan pengurus Perseroan bukan merupakan suatu perubahan keterangan yang perlu persetujuan Menteri dan karenanya tidak dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Adapun Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., notaris di Jakarta berisi mengenai (perubahan) susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Harlina Tjandinegara
Komisaris Independen	: F. Parno Isworo
Komisaris Independen	: Didi Achdijat
Komisaris Independen	: Rifqi Musharnanto

Direksi:

Direktur Utama	: Loeki Sundjaja Putera
Wakil Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Direktur	: Salwati Agustina
Direktur	: Simon Nurgiri Simansjah
Direktur	: Henky Susanto



Mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas telah disampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-16166 tanggal 29 Juni 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0048976.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010.

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yaitu pada tanggal 7 Juni 2010.

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 1546 tanggal 12 Februari 2008 dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek yaitu PT Sirca Datapro Perdana adalah sebagai berikut:

Modal Dasar - Nilai Nominal Rp 1.000	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	27.900.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	3.638.494.330	3.638.494.330.000	52,13%
DZ Bank International S.A. DZ Bank International, Singapore Ltd	549.713.623	549.713.623.000	7,88%
Whistler Petrochemical Corporation	332.247.971	332.247.971.000	4,76%
PT Barito Pacific Lumber	255.702.400	255.702.400.000	3,66%
PT Tunggal Setia Pratama	246.060.000	246.060.000.000	3,53%
Prajogo Pangestu	34.050.650	34.050.650.000	0,49%
PT Muktilestari Kencana	16.207.800	16.207.800.000	0,23%
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	1.907.416.010	1.907.416.010.000	27,32%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.979.892.784	6.979.892.784.000	100,00%
Jumlah Saham dalam portepel	20.920.107.216	20.920.107.216.000	

2. PT Petrogas Pantai Madura

a. Riwayat Singkat

PPM merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta Notaris Rizka Noviarni, SH, No 7, tanggal 25 Mei 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C-00404 HT.01.10.TH.2006, tanggal 6 Januari 2006.

Anggaran Dasar PPM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 dibuat dihadapan Rahmat Cahyobroto, S.Sos, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor mengenai perubahan susunan pemegang saham PPM.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PPM adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Rahmat Cahyobroto, S.Sos, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Henky Susanto
 Komisaris : Mokhammad Saiful Hadari
 Komisaris : Sitrul Arsyih

Direksi :

Direktur Utama : Heru Pramono
 Direktur : Gogod Herryanto
 Direktur : Jonny Karli
 Direktur : Achmad Fauzi

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Modal dasar PPM adalah Rp 1.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000, dimana dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% yaitu sebesar Rp 250.000.000.

Kepemilikan saham PPM pada saat IKPS ini diterbitkan APHAS No. 03 tanggal 5 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

Kepemilikan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Barito Pacific Tbk	122.500	122.500.000	49,00%
PT Petrogas Wira Jatim	63.750	63.750.000	25,50%
PT Wira Usaha Sumekar	63.750	63.750.000	25,50%
Jumlah	250.000	250.000.000	100,00%

wp



C. Analisis Industri Perseroan dan PPM

1. Industri Petrokimia Indonesia

Petrokimia tetap menjadi daya tarik di masa industrialisasi saat ini. Sebagian besar produk substansi berbahan kimia berbahan baku minyak bumi yang dihasilkan oleh berbagai pabrik petrokimia, pada akhirnya akan diolah menjadi produk-produk rumah tangga, isolasi untuk industri dan suku cadang pabrik.

Olefin adalah produk tingkat pertama dari naphta yang berasal dari minyak bumi mentah. Komponen hidrokarbon dari cairan yang sangat mudah terbakar ini dipisahkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk bahan bakar minyak dan olefin. Bahan bakar digunakan sehari-hari untuk pembakaran mesin mobil, pabrik, dsb. Di sisi lain, olefin merupakan bahan dasar untuk pembuatan plastik, dinding rumah, serat sintesis, resin, film, perekat, material pelapis, isolator, cat, zat pewarna, busa, deterjen, komponen otomotif dan elektronik, serta masih banyak lagi.

Naphta diubah menjadi olefin dalam bentuk ethylene dan propylene serta produk jadi untuk py-gas dan C4 campuran. Ke-empat substansi kimia tersebut adalah bahan baku untuk 18 produk petrokimia yang pada akhirnya juga menjadi bahan baku bagi berbagai macam perusahaan manufaktur yang produk-produknya memerlukan satu atau lebih elemen petrokimia.

Produk petrokimia merupakan produk lanjut dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Produk petrokimia yang dihasilkan dari hasil pengolahan minyak bumi berupa naphta dan kondensat adalah produk aromatik (benzene, toluene, dan xylene) dan produk olefin (ethylene, propylene, dan butadiene) yang merupakan bahan baku untuk industri sandang, karet, sintetis, plastik, dan yang lainnya.

Industri petrokimia nasional sempat mengalami kejayaannya pada tahun 1998 dengan pertumbuhan di atas 12-15% di atas pertumbuhan total industri maupun pertumbuhan ekonomi. Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, mengatakan realisasi pertumbuhan industri petrokimia tahun 2010 sekitar 4%.

Berdasarkan data Indonesia Research & Strategic Analysis, pada tahun 2010, Indonesia mengimpor naphta sebesar 1,6 juta ton dan mengekspor naphta sebanyak 785 ribu ton. Akibatnya kapasitas produksi petrokimia di Indonesia tidak meningkat. Padahal konsumsi petrokimia diperkirakan tumbuh 5,2% selama tahun 2011 – 2017.

Impor bahan baku petrokimia tahun 2011 diperkirakan masih tinggi akibat belum berkembangnya industri petrokimia lokal. Padahal, pemerintah pernah menargetkan, industri petrokimia akan berkembang di 2011.

wf



Departemen Riset IFT menilai kendala pertumbuhan industri petrokimia adalah minimnya investor di sektor hulu. Dan juga belum ada integrasi antara semua lembaga pemerintah untuk mengembangkan industri ini. Industri petrokimia yang bahan bakunya mengandalkan industri minyak dan gas, masih belum dianggap prioritas, sehingga impor bahan baku masih harus dilakukan.

Industri hulu petrokimia mengolah naphta menjadi berbagai produk turunan, di antaranya polyethylene dan polypropylene yang dipergunakan untuk produksi plastik. Kebutuhan plastik dalam negeri terus meningkat mengikuti pertumbuhan industri makanan dan minuman yang pada 2011 ini diperkirakan tumbuh 13% hingga 15%.

Tahun ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia menyatakan bahwa industri menargetkan pertumbuhan produksi monomer 15% dan polimer 8%. Namun, hingga kuartal 1/2011 berakhir, tingkat pertumbuhan produksi hanya mencapai 3,2% atau jauh di bawah target hingga akhir tahun.

Pertumbuhan industri petrokimia nasional selama kuartal 1/2011 hanya mencapai 3,2% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, jauh di bawah target 15%, hingga akhir tahun 2011. Belum optimalnya kinerja industri antara lain disebabkan oleh belum berjalannya program integrasi hulu dan hilir petrokimia sehingga mengurangi minat calon investor.

Sejak akhir tahun 2007 Perseroan mulai bergerak di bidang industri petrokimia, terbukti dengan diakuisisinya PT Chandra Asri ("CA") termasuk mendapatkan anak perusahaannya yaitu PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI") dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk ("TPI") yang diakuisisi Perseroan pada tahun 2008, di mana pada Januari 2011 CA di *merger* ke dalam TPI Dan kemudian TPI berubah nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP"). Berikut ini penjelasan mengenai Perseroan dan anak perusahaan dalam bidang petrokimia:

1. Lokasi Pabrik

Terdapat 3 lokasi pabrik yang dipakai untuk memproduksi bahan petrokimia di daerah Cilegon, yang memproduksi *Olefins*, *Polyethylene*, *Pyrolysis gasoline (Py-gas)* dan *Mixed C4*, *Stryene Monomer*, *Ethyl Benzene*, *Toluene* dan *BTM* dan *resin Polypropylene*.

2. Produk

Olefins

Produk utama yang dihasilkan CAP adalah *ethylene* dan *propylene*, yang dikenal dengan *monomer*. Selama tahap produksi *olefins*, proses pemecahan *ethylene* menghasilkan produk sampingan, yakni *py-gas* dan *mixed C4*. *Ethylene* digunakan sebagai pasokan bahan baku utama untuk proses produksi *polyethylene*. Pada tahun 2011(jan-oct), 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004, sebesar 55,8%, 55,5%, 63,2%, 59,9%, 56,7%, 59,6%, 40,7% dan 51,9% dari *ethylene* yang diproduksi CAP digunakan untuk memproduksi *polyethylene*.



Ethylene

Ethylene merupakan produk petrokimia paling banyak digunakan secara luas di dunia dengan tingkat permintaan berkisar antara 50 juta ton sampai 150 juta ton pada tahun 1990 sampai tahun 2011. *Ethylene* digunakan sebagai bahan utama pada proses pembuatan *polyethylene*.

Propylene

Propylene merupakan produk petrokimia kedua terbanyak yang digunakan secara luas di dunia dengan tingkat permintaan pada tahun 2005 sekitar 62 juta ton dan pada tahun 2010 telah mencapai sekitar 73 juta ton, dan diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai 115 juta ton per tahun dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Sebagian besar *propylene* saat ini diproduksi oleh *steam cracker* sebagai produk sampingan dari *ethylene*.

Polyethylene

Polyethylene adalah *polyolefin* yang umum digunakan di dunia. Terdapat tiga jenis *polyethylene*, yakni: *Low Density Polyethylene* (LDPE), *High Density Polyethylene* (HDPE) dan *Linear Low Density Polyethylene* (LLDPE). Ketiga jenis *polyethylene* ini dihasilkan melalui proses polimerisasi *ethylene*. Namun, ketiga jenis *polyethylene* ini berbeda dalam hal struktur molekulnya, yang menyebabkan adanya perbedaan karakteristik fisik, seperti kekerasan, kejernihan dan titik leburnya.

Pyrolysis gasoline (Py-gas)

Py-gas merupakan produk sampingan (*by-product*) yang dihasilkan pada saat proses *ethylene cracker* berlangsung.

Mixed C4

Py-gas merupakan produk sampingan (*by-product*) yang dihasilkan pada saat proses *ethylene cracker* berlangsung.

Styrene Monomer

Styrene Monomer diproduksi melalui proses penggabungan *ethylene* dan *benzene*. *Styrene Monomer* merupakan produk antara dari berbagai petrokimia lainnya.

Styrene

Styrene dikenal juga dengan nama *Phenyl Ethylene*, *Vinylbenzene* dan *Cinnamene*. Secara fisik, *styrene* tidak berwarna, berbentuk cairan seperti minyak, dan dapat ditembus oleh cahaya. *Styrene* akan membeku pada suhu $-145,14\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan mendidih pada suhu $145,14\text{ }^{\circ}\text{C}$. Keadaan kritis *styrene* terjadi pada suhu $367,7\text{ }^{\circ}\text{C}$, pada tekanan $36,3\text{ bar}$ dan pada volume $3,55\text{ cm}^3/\text{g}$.

Ethylbenzene (EB)

Ethylbenzene dikenal juga dengan nama *Ethylbenzol* dan *Phenyl Etane*. Secara fisik, *ethylbenzene* tidak berwarna dan memiliki bau aromatik. *Ethylbenzene* akan membeku pada suhu $-94,975\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan mendidih pada suhu $136,186\text{ }^{\circ}\text{C}$. Keadaan kritis *ethylbenzene* terjadi pada suhu $344,05\text{ }^{\circ}\text{C}$, pada tekanan $36,06\text{ bar}$ dan pada volume $0,3745\text{ cm}^3/\text{mol}$.

Toluene

Toluene dikenal juga dengan nama *Methylbenzene*, *Phenil Methane* dan *Toluol*. Secara fisik, *toluene* tidak berwarna dan memiliki bau aromatik. *Toluene* akan membeku pada suhu $-95,000\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan mendidih pada suhu $110,608\text{ }^{\circ}\text{C}$. Keadaan kritis *toluene* terjadi pada suhu $320,875\text{ }^{\circ}\text{C}$, pada tekanan $4,236\text{ Mpa}$ dan pada volume $298,000\text{ cm}^3/\text{mol}$.

Benzene Toluene Mixture

Benzene toluene mixture merupakan produk samping dari kolom distilasi dimana komponen terbanyak adalah *benzene* dengan *mixed toluene* dan sejumlah kecil *ethyl benzene*. Secara fisik, *benzene toluene mixture* berbentuk cairan tidak berwarna, memiliki bau aromatik dan memiliki sifat mudah terbakar. *Benzene toluene mixture* akan membeku pada suhu $5,53^{\circ}\text{C}$ dan mendidih pada suhu $80,1^{\circ}\text{C}$. Di samping itu, *benzene toluene mixture* memiliki *triple point* pada suhu $5,52^{\circ}\text{C}$. Keadaan kritis *toluene* terjadi pada suhu $289,01^{\circ}\text{C}$, pada tekanan $48,981\text{ atm}$ dan pada volume $259\text{ mol}/\text{cm}^3$.

Polypropylene

Polypropylene adalah produk *polyolefin* yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi kemasan plastik. *Polypropylene* yang dihasilkan perusahaan meliputi *homopolymer*, *random copolymer* dan *impact copolymer*. Produk *homopolymer* terutama digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai macam produk konsumen seperti plastik kemasan makanan, peralatan rumah tangga, pembungkus rokok, karung plastik, alas karpet dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sementara itu, produk *random copolymer* terutama digunakan untuk pembuatan berbagai kemasan botol plastik, antara lain untuk minyak goreng dan produk kebersihan serta wadah plastik. Produk *impact copolymer* terutama digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan komponen kendaraan, barang elektronik dan berbagai aplikasi lainnya. Bahan baku utama *polypropylene* adalah *propylene*, yang dihasilkan melalui proses *naphtha cracking* atau melalui proses *dehidrogenasi propane*.

Sedangkan untuk produk petrokimia, prospek usaha sangat tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran global dari produk petrokimia tersebut. Menurut *Chemical Market Associates, Inc* (CMAI), antara tahun 2009 – 2014, permintaan dunia untuk *propylene* akan meningkat sekitar 68 – 88,7 juta ton dengan pertumbuhan 5,5% per tahun, dimana pada saat yang sama akan terdapat penambahan kapasitas sebesar 8,6 juta ton. Sementara proyeksi pertumbuhan *ethylene* dunia adalah sebesar 3%/tahun.

Produk yang dihasilkan Perseroan untuk industri petrokimia selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	2011	2010	2009
Nama produk	Ethylene	Ethylene	Ethylene
Nama produk	Propylene	Propylene	Propylene
Nama produk	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene
Nama produk	Pyrolysis gasoline (Py-gas)	Pyrolysis gasoline (Py-gas)	Pyrolysis gasoline (Py-gas)
Nama produk	Mixed C4	Mixed C4	Mixed C4
Nama produk	Styrene Monomer	Styrene Monomer	Styrene Monomer
Nama produk	Ethylbenzene (EB)	Ethylbenzene (EB)	Ethylbenzene (EB)
Nama produk	Toluene	Toluene	Toluene
Nama produk	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene

2. Industri Perkebunan dan Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil / CPO*) Indonesia

Pada tahun 2010, Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit, melalui transaksi akuisisi saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada RIM.

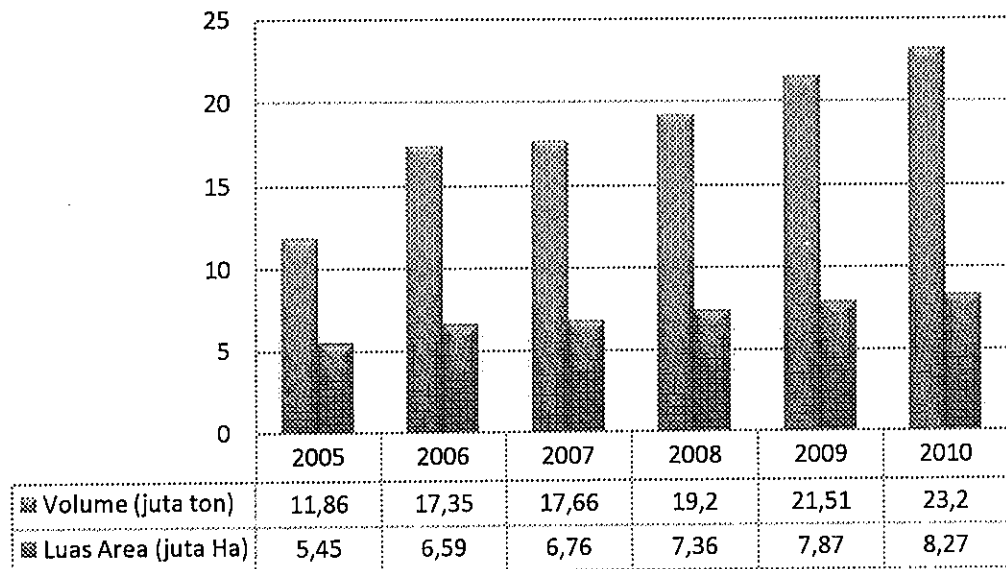
RIM merupakan induk perusahaan yang memiliki dua anak perusahaan yaitu GUM dan TBSM. TBSM memiliki anak perusahaan yaitu TBSMD. Pada saat ini, GUM, TBSM dan TBSMD dimiliki 100,00% secara langsung dan tidak langsung oleh RIM serta bergerak dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya RIM juga masih memiliki potensi pengembangan luas kebun kelapa sawit. Pada tanggal 30 Juni 2011, ijin lokasi yang dimiliki oleh anak perusahaan RIM adalah seluas 27.566,00 Ha. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, GUM, TBSM dan TBSMD telah melakukan penanaman seluas 7.739,82 Ha.

Terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang baru di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit, Perseroan memiliki prospek yang menjanjikan dalam industri tersebut. Pada tahun-tahun terakhir, produk-produk kelapa sawit dan turunannya telah menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Produk-produk kelapa sawit ini dapat digunakan tidak hanya sebagai minyak goreng tetapi juga untuk bahan-bahan kosmetik sampai sebagai bahan bahar alternatif sehingga sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang.

Berikut ini adalah tabel kinerja komoditas sawit Indonesia sejak tahun 2005 – 2010:

Kinerja Komoditas Sawit Indonesia (2005 - 2010)



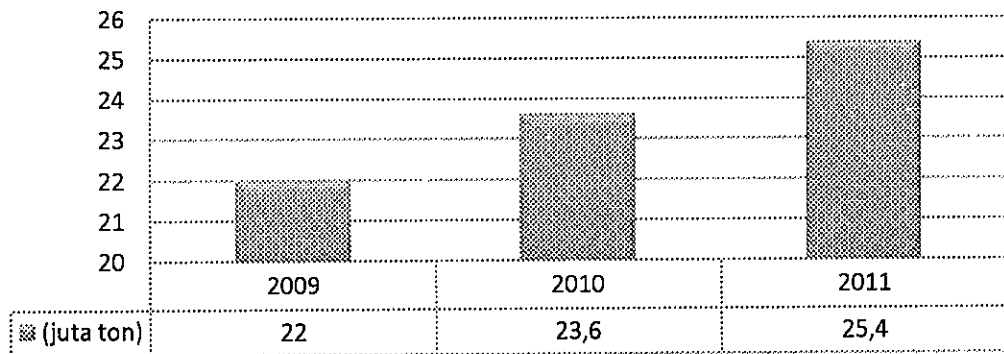
Sumber: Kementerian Pertanian

Dalam Harian Bisnis Indonesia edisi Mei 2011 disebutkan bahwa di tahun 2010, empat besar negara yang menjadi tujuan ekspor CPO Indonesia adalah India (5,65 juta ton), Uni Eropa (3,7 juta ton), China (2,4 juta ton) dan Bangladesh (0,63 juta ton).

Oil World memperkirakan produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2011 akan bertambah 7,7% dari pencapaian tahun lalu menjadi 24 juta ton. Jumlah ini sekitar 49,8% dari total produksi CPO dunia. Kenaikan produksi CPO di Indonesia diprediksi karena adanya penambahan luas lahan menghasilkan sebesar 0,35 juta Ha menjadi 6,09 juta Ha. Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (*United State Department of Agriculture*) memiliki proyeksi angka produksi minyak sawit Indonesia yang lebih tinggi. Pada periode tahunan yang dimulai pada 1 Mei 2009, produksi minyak sawit Indonesia tercatat 22 juta ton, pada periode tahun lalu meningkat 1,8% menjadi 23,60 juta ton. Seiring dengan perluasan kebun sawit yang memasuki masa panen, produksi sawit Indonesia pada periode tahun ini diproyeksikan tumbuh 7,63% menjadi 25,40 juta ton.



Produksi Minyak Sawit Indonesia (2009 - 2011*)



* Prediksi
Sumber: USDA, 2011, Bloomberg

Volume ekspor minyak sawit mentah Indonesia selama kuartal I/2011 turun menjadi 3,2 juta metrik ton dibanding periode sama tahun lalu yaitu sebesar 3,6 juta metrik ton. Namun, nilai ekspor tahun ini 46% lebih tinggi, naik dari USD 2,67 juta menjadi USD 3,90 juta. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai, pertumbuhan nilai ekspor CPO nasional selama kuartal I/2011 didorong lonjakan harga minyak sawit internasional. Pada kuartal I/2010, harga CPO hanya USD 782,79 per ton, sedangkan rata-rata harga pada periode sama tahun ini USD 3,90 per ton. Selama kuartal I/2011, harga tertinggi CPO terjadi pada Maret 2011 mencapai USD 1,303 per ton. Harga CPO selama periode tersebut merupakan yang tertinggi setelah harga sempat anjlok. Sementara itu, harga CPO selama April USD 1,213 per ton dan Mei USD 1,146 per ton per ton. Harga tersebut turun dibanding bulan sebelumnya. Namun, harga tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada semester I/2011, total ekspor minyak sawit sebesar 8,2 juta ton dengan 56,02% dalam bentuk CPO dan olahan sebesar 43,98%.

Indonesia berpeluang memasok kebutuhan CPO (*crude palm oil*) dunia yang akan naik 5,5 juta ton yang terdiri dari peningkatan kebutuhan pangan 4 juta ton dan permintaan untuk biodiesel minimal 1,5 juta ton. Kinerja ekspor CPO diperkirakan masih bertumbuh 7%-10%. Gapki mengatakan untuk merealisasikan total produksi minyak sawit mentah Indonesia pada 2020 menjadi 40 juta ton, harus ada perluasan tanaman kelapa sawit minimal 500.000 Ha per tahun. Selisih permintaan dan produksi ada sekitar 500 ribu hingga 1 juta ton per tahun, di mana permintaan per tahun sekitar 5 juta hingga 5,5 juta ton.



3. Industri Perakayuan Indonesia

Indonesia dikenal dunia memiliki hutan tropis 133,8 juta Ha dengan berbagai kekayaan mega-biodiversitas dan penyeimbang iklim global. Selain ekologi, hutan tropis Indonesia juga berfungsi ekonomi dan sosial karena pengelolaannya dilakukan secara lestari untuk kemakmuran rakyatnya.

Sektor kehutanan telah memberikan kontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, di mana industri ini pada 1990-1995 menguasai pasar kayu tropis (*hardwood*) dunia, dan menyumbangkan devisa 16 miliar dolar AS/tahun dan terbesar ke-2 setelah migas. Industri kehutanan juga memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan sosial-ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan berupa kesempatan kerja, infrastruktur dan percepatan pembangunan wilayah.

Namun, sejak lima tahun terakhir, kinerja produksi dan ekspor industri kehutanan (kecuali *pulp*) mengalami kemerosotan. Industri kehutanan saat ini menghadapi berbagai permasalahan, seperti penurunan secara drastis khususnya bahan baku industri (BBI) dari hutan alam. Sementara industri belum siap menggunakan BBI kayu *fast growing species* berdiameter kecil, inefisiensi produksi, biaya ekonomi tinggi, distorsi pasar akibat krisis ekonomi global, dukungan kebijakan dan regulasi kurang kondusif, serta hambatan eksternal *trade barrier* dan isu lingkungan. Jika keadaan tersebut berlanjut, dikhawatirkan industri kehutanan semakin terpuruk dan kalah dalam persaingan di pasar global.

Berdasarkan Harian *Investor Daily*, industri barang kayu dan hasil hutan Indonesia di tahun 2009 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,4%. Kondisi ini bertambah buruk dengan kinerja industri perakayuan nasional yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,5% di tahun 2010, atau menurun sebesar 4,9% dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2009.

Menurut Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya ketersediaan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang kayu. Faktor lain yang juga mengakibatkan pertumbuhan negatif industri perakayuan Indonesia adalah penurunan daya saing produk dalam negeri dan penguasaan pasar. Tingginya ekspor kayu mentah mengakibatkan industri perakayuan dalam negeri tersaingi oleh industri kayu luar negeri yang memperoleh pasokan bahan baku dari Indonesia. Di sisi lain, produk kayu dan hasil hutan Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan pasar luar negeri akan kehilangan pangsa pasarnya.

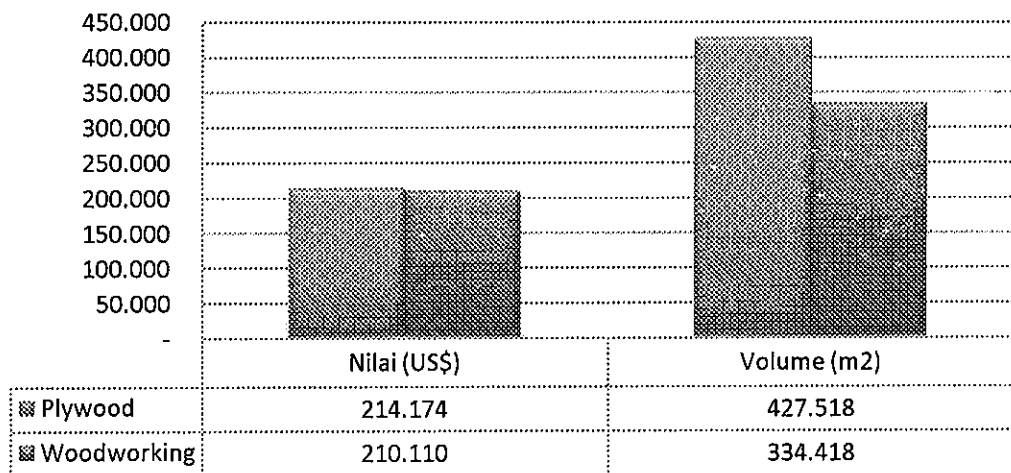
Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKI) juga menuturkan bahwa ketidakmampuan untuk menutup biaya produksi juga menjadi faktor yang mengambil peran penting sebagai penyebab negatifnya pertumbuhan industri perakayuan Indonesia di tahun 2010, dimana sejumlah pabrik menghentikan produksinya akibat ketidakmampuan untuk membayar *cash cost*.

Selain itu, pengusaha kayu juga sering diminta untuk membayar lebih dari standar yang ditetapkan sehingga biaya produksi produk kayu menjadi tinggi yang pada akhirnya akan berimbas pada ketidakmampuan produk dalam negeri tersebut bersaing dengan produk luar negeri yang biaya produksinya jauh lebih murah.

Satu-satunya produk kayu Indonesia yang masih mengalami pertumbuhan positif adalah industri *pulp*. Menurut APKI, pasar industri per kayu Indonesia sebenarnya masih memiliki peminat. Namun, jumlah peminat produk kayu asal Indonesia tersebut terus menurun sebagai akibat dari tingginya harga produk kayu Indonesia dibandingkan dengan produk kayu dari luar negeri.

Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat struktur pemenuhan bahan baku kayu olahan pada 2010 yang berasal dari hutan tanaman sebesar 31,99 juta m³ atau 79,46% sedangkan yang berasal dari hutan alam sebanyak 5,3 juta m³ atau 13,16%. Ekspor industri kayu nasional pada tahun 2010 tercatat 2,76 juta m³ dengan nilai USD 1,5 miliar, naik beberapa poin jika dibandingkan dengan volume ekspor 2009 sebesar 2,72 juta m³ dengan nilai ekspor USD 1,3 miliar

Ekspor Kayu Olahan Per Kuartal I/2011



Sumber: Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia

Dalam harian Bisnis Indonesia disebutkan bahwa industri kayu lapis Indonesia berpeluang memanfaatkan kenaikan harga di pasar internasional menyusul tingginya permintaan dari Jepang akibat bencana gempa dan tsunami belum lama ini. Harga produk premium kayu lapis meningkat berkisar USD 950 – USD 1.050 per m³ di pasar internasional, padahal pada tahun 2010 masih berkisar pada USD 640 – USD 700 per m³.



Sekretaris Jenderal Kemenhut mengatakan ada tambahan permintaan kayu lapis dari Jepang yang mencapai 2,2 juta lembar atau setara 44 ribu meter kubik mulai Mei hingga September 2011. Jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah dan bangunan yang rusak pasca-bencana tsunami di negara itu. Dia memprediksi kenaikan kebutuhan kayu lapis dari Jepang akan meningkatkan volume ekspor ke negara itu sekitar 10% menjadi 1,02 juta meter kubik dari tahun lalu sebesar 931.961 meter kubik. Nilai ekspor kayu lapis Indonesia ke Jepang tahun lalu mencapai USD 555,98 juta, naik dari tahun 2009 sebesar USD 453,63 juta.

Kemenhut menilai industri pengolahan kayu masih bertumbuh pada tahun 2011 dengan realisasi produksi *plywood* pada periode Januari – Juni 2011 mencapai 1,36 juta m³. Berdasarkan data Kemenhut, produksi pengolahan kayu pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 44 juta m³, sedangkan realisasi pada semester I/2011 sebesar 22,6 juta m³. Penggunaan kayu olahan dari hutan tanaman industri semakin meningkat yaitu 63% atau 8,3 juta Ha, sedangkan sumber dari hutan alam semakin menurun yaitu 27% atau 1,9 juta Ha. Realisasi produksi kayu olahan jenis *veneer* pada Januari – Juni 2011 mencapai 346.125 m³, kayu gergajian 752.107 m³ dan *pulp* sebanyak 2,66 juta m³.

Industri kehutanan berdaya saing tinggi berbasis BBI yang berkelanjutan merupakan industri masa depan dalam pembangunan nasional dapat dicapai melalui strategi optimalisasi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, optimalisasi produk industri, efisiensi dan diversifikasi, minimalisasi biaya industri, penguasaan akses pasar dan promosi, dan inovasi teknologi dan didukung oleh SDM profesional. Apabila langkah strategis tersebut dapat dilaksanakan secara sinergis, konsisten dan berkelanjutan, industri kehutanan berpeluang mengukir masa keemasan kedua pada tahun 2015 dan menjadi pintu gerbang era modernisasi industri kehutanan tahun 2020, dengan indikator kerja sebagai berikut:

- Produksi 2015 : kayu lapis 13,1 – 16,5 juta m³, *pulp* 8,5 – 9,9 juta ton, kayu gergajian dan *woodworking* 6,2 juta m³, dan *furniture/kerajinan* 1,8 juta ton.
- Produksi 2020 : kayu lapis meningkat 30,5 – 55,4 juta m³, *pulp* meningkat 16,5 - 26,0 juta ton, kayu gergajian dan *woodworking* meningkat 13,2 juta m³, *furniture/kerajinan* meningkat 4,1 juta ton.

Dengan kinerja produksi tersebut, industri kehutanan berpotensi menyumbang devisa pada tahun 2015 sebesar 16,5 – 17,2 miliar dolar AS dan 2020 naik mencapai 38,6 – 43,6 miliar dolar AS. Pertumbuhan industri kehutanan hingga tahun 2015 berpotensi menyerap tenaga kerja sarjana sekitar 8.500 orang dan tenaga kerja lain lebih dari 6,3 juta orang.

Produk yang dihasilkan Perseroan untuk industri perkayuan selama 3 tahun terakhir adalah *particle board*.



4. Industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia

- Industri Minyak Bumi Indonesia

Dalam data pemerintah, selama periode Desember 2009 – November 2010, rata-rata *lifting* minyak mencapai 954.000 barel per hari (bph), lebih rendah dari target 965.000 bph. Sedangkan pada periode Desember 2010 – Februari 2011 diperkirakan realisasi *lifting* minyak hanya mencapai rata-rata 892.900 bph atau masih jauh dari target sebesar 970.000 bph. Hingga Maret 2011, produksi minyak bumi dan kondensat paling tinggi hanya mencapai 911.765 bph. Sementara *lifting* minyak pada periode Januari – Maret 2011, mencapai 873.000 bph atau hanya 90% dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yaitu 970.000 bph

Dalam Harian Investor Daily disebutkan bahwa Pemerintah berencana merevisi target produksi (*lifting*) minyak untuk tahun 2011 dari sebelumnya 970.000 bph menjadi antara 945.000 – 950.000 bph. Ada sejumlah faktor yang menjadi penghambat produksi minyak tahun ini. Pertama adalah faktor penurunan produksi alamiah sekitar 12% per tahun. Kedua adalah pemberlakuan asas *cabotage* pada kegiatan usaha hulu migas per 1 Januari 2011 sesuai dengan Inpres Nomor 5/2005. Pemberlakuan asas tersebut dinilai akan berdampak serius terhadap produksi minyak nasional.

Akan tetapi BP Migas menargetkan *lifting* yang optimistis berdasarkan perkiraan per 28 Juni 2011 hanya 920.000 bph sepanjang tahun ini. Hingga 30 Juni 2011, produksi minyak rata-rata mencapai 904.305 bph. Jumlah tersebut hanya 93,2% dari target APBN 2011. Rendahnya *lifting* minyak pada akhir Juni tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang terlambat ditanggulangi dan ada beberapa wilayah yang tidak bisa berproduksi optimal, seperti Blok West Madura Offshore operator PT Pertamina Hulu Energi dan Blok Duri operator Chevron yang belum bisa berproduksi karena kerusakan pipa. Secara keseluruhan *lifting* minyak 2011 belum dapat melampaui kinerja tahun sebelumnya karena pecahnya pipa jadi pasokan gas untuk injeksi uap panas berhenti.

Pemerintah memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian crude price/ICP*) sepanjang 2011 di kisaran USD 80 -100 per barel. Angka ini lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2011 yaitu sebesar USD 80. Harga ICP dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Sedangkan harga minyak mentah dunia dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu besaran pasokan. Berdasarkan data dari International Atomic Energy Agency (IAEA), persediaan minyak mentah dunia saat ini masih di atas kebutuhan. Untuk tahun 2012, *lifting* minyak diperkirakan akan berada pada 950.000 bph.

- Industri Gas Bumi Indonesia

Lembaga riset dan konsultan independen global, Frost & Sullivan, memprediksi cadangan gas di Indonesia akan terus meningkat. Hal tersebut seiring dilaksanakannya jumlah pengerjaan proyek gas baru yang disupervisi oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Akan tetapi, perkiraan peningkatan produksi gas berbanding terbalik dengan produksi minyak yang terus merosot turun.

Investasi di sektor hulu migas masih mendominasi peluang yang ada. Dominasi investasi hulu migas disebabkan antara lain meningkatnya pasar gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) dan sektor pendukungnya, seperti penyediaan fasilitas terapung berbentuk kapal untuk produksi dan penyimpanan sementara migas (*floating production storage and offloading/FPSO*), kapal yang didesain untuk mengolah gas untuk dijadikan produk LNG (*floating liquefied natural gas/FLNG*) dan *marine support vessel*.

Berdasarkan data BP Migas, kontrak pasokan gas 2011 untuk dalam negeri sebesar 4.366 Bbtud (56,78%), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pasokan gas dalam negeri pada 2010 sebesar 4.342,71 Bbtud (50,18%). Sementara itu, kontrak pasokan gas tujuan ekspor pada 2011 sebesar 3.322 Bbtud (43,22%), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ekspor gas 2010 sebesar 4.311,58 Bbtud (49,82%).

Di sisi lain, kontrak pasokan gas untuk sektor kelistrikan pada tahun ini juga mengalami kenaikan dari 854,88 Bbtud (10%) pada 2010 menjadi 1.510,6 Bbtud. Demikian halnya dengan kontrak pasokan gas ke sektor industri naik dari 1.203,18 Bbtud (14%) pada 2010 menjadi 1.690,43 Bbtud (21,98%) pada 2011.

D. Sifat Transaksi

Perseroan akan memberikan pembiayaan sebesar maksimum USD 4 juta kepada PPM. PPM merupakan anak perusahaan yang dimiliki Perseroan sebesar 49,00%. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

Pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi pada Transaksi Pembiayaan ditinjau dari sisi kepengurusan adalah Henky Susanto yang menjabat sebagai Direktur Perseroan dan sekaligus sebagai Komisaris Utama pada PPM.

Dengan demikian Transaksi Pembiayaan ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.1.



IV. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

SRR, perusahaan jasa penilai dengan izin usaha Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam - LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran SRR No. 232/SRR/SPN-F/BP/OR/VIII/11 tanggal 13 Agustus 2011 untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan. Hasil analisis atas kewajaran Transaksi Pembiayaan tertuang pada Laporan Pendapat Kewajaran SRR No. 142/SRR/LP-F/BP/OR/XII/11 tanggal 13 Desember 2011 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak dalam Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan adalah Perseroan dan PPM.

b. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan, yaitu Perseroan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PPM sebesar maksimum USD 4,00 juta.

c. Tujuan Analisis Kewajaran

Sehubungan dengan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang merupakan transaksi afiliasi, tujuan dari analisis kewajaran adalah untuk memberikan pendapat apakah Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan merupakan transaksi yang wajar dan tidak merugikan bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

d. Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Pendapat kewajaran Perseroan disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal pendapat kewajaran diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran, Perseroan juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Analisis Kewajaran


Analisis kewajaran atas Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan difokuskan pada perbandingan atas transaksi-transaksi sejenis dengan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan.


f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan, SRR berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi Pemberian Fasilitas Pembiayaan adalah wajar bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan.

Hormat kami,
Atas nama Direksi Perseroan


METERRA
7365/AAF/46603365
6000 DJP
Henky Susanto
Direktur


Salwati Agustina
Direktur

w